

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri jika pembangunan negara membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Penerimaan devisa dari ekspor sekaligus ketersediaan bermacam bantuan keuangan luar negeri dinilai masih belum memenuhi keperluan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembangunan. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mendorong sumber pendapatan negara yang lain, yakni pajak.

Sektor pajak selaku bagian dari APBN sekarang mempunyai dampak cukup besar pada pendapatan negara selaku modal pembangunan negara. Tujuan dimana ditetapkan pemerintah untuk sektor ini terus meningkat, serta dalam di tahun-tahun sebelumnya, sektor perpajakan jadi target tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Perihal itu ialah dampak dari stagnannya pertumbuhan perekonomian nasional sekarang (Munari, 2005:120).

Fenomena mangkirnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Surabaya mencerminkan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. Surabaya, sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Jawa Timur, mempunyai potensi pajak yang besar namun seringkali menghadapi masalah dalam hal ketaatan wajib pajak. Berbagai aspek utama di mana menyebabkan rendahnya taraf ketaatan ini termasuk kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak, kompleksitas sistem perpajakan, dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum yang tegas. Banyak wajib pajak, baik individu ataupun badan usaha, mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang ada atau merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban itu akibat sistem perpajakan yang dinilai rumit dan seringkali berubah.

Di samping itu, ketidakpastian mengenai pengelolaan dana pajak serta dampak langsungnya terhadap pembangunan dan pelayanan publik juga dapat mengurangi motivasi wajib pajak untuk patuh. Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggar juga memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan edukasi perpajakan, menyederhanakan regulasi pajak, serta

memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak serta transparansi dalam pengelolaan dana publik juga sangat penting untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

Untuk memenuhi tujuan yang terkait dengan perpajakan, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak mereka sebagaimana digambarkan oleh peraturan yang berlaku (Mario dan Khoiru, 2008:3). Mempertimbangkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan penentu penting dalam meningkatkan pendapatan pajak, menjadi penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, terutama di antara wajib pajak individu mengenai pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan (PBB).

Sumber pendapatan termasuk dimana dapat diandalkan untuk pajak properti ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bangunan dan tanah, di mana ialah objek pajak Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempunyai bentuk fisik dimana tidak bisa disembunyikan, yang membuatnya lebih mudah ditinjau. PBB mempunyai pengaruh yang lebih luas karena uang yang diterima oleh negara itu dikembalikan.

Mereka yang mempunyai pendapatan tinggi biasanya juga mempunyai pengeluaran yang tinggi, sementara mereka yang mempunyai pendapatan rendah biasanya mempunyai pengeluaran yang lebih rendah. Akibatnya, untuk pembangunan wilayah itu (Suhardito dan Sudiby, 1999:3). Dalam era otonomi saat ini, daerah menerima bantuan dari PBB.

Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan peran PBB selaku penyedia penerimaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Upayanya ialah meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajaknya sebab penerimaan pajak yang sukses menunjukkan kesadaran publik. Direktorat Jenderal Pajak dapat menyelidiki kemungkinan penerimaan PBB dari hasil perubahan itu, mengingat banyaknya perubahan tanah dan struktur di daerah perkotaan.

Semua tindakan yang dilaksanakan oleh seorang kepala keluarga sebagai anggota masyarakat, termasuk membayar PBB, dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. PBB ialah jenis pajak pusat yang mayoritas hasilnya diberikan lagi pada Daerah Tingkat I dan II (Linus, 2002:2). Di bawah otonomi daerah, Tangerang

Selatan membutuhkan dana untuk pembangunan yang berasal dari PBB. Perihal itu akan memungkinkan proses pembangunan berlangsung dengan lancar. Keterlibatan ketua keluarga sebagai anggota rakyat saat melunasi kontribusi mereka pada rasa sadarnya rakyat oleh PBB paling penting. Kepala keluarga secara sukarela membayar pajak yang bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan ialah kesadaran yang dimaksud. Faktor utama dalam melunasi pajak masyarakat ialah kesadaran; sikap bijaksana muncul dari kesadaran hati nurani. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk mendapatkan pajak, bahkan dengan cara yang bias, tanpa kesadaran ini. Faktor-faktor seperti latar belakang masyarakat, pencapaian pendidikan, status sosial ekonomi, kewajiban keluarga dan tanggungan, tingkat kesadaran, kebijakan pemerintah, dan standar intelektual dan etika, antara lain sangat memengaruhi pembayaran masyarakat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Linus, 2002:2).

Dalam hal masalah kesadaran pajak, pembayaran pajak termasuk biaya yang terkait dengan pendapatan seseorang. Pendapatan kepala keluarga berpengaruh pada pembayaran pajak, tetapi ada manfaat tambahan bagi mereka yang menyadari pentingnya fungsi pajak untuk pembangunan bangsa. Ada beberapa orang yang enggan membayar pajak karena alasan seperti penghasilannya kecil atau sengaja lalai meskipun pendapatannya besar, tetapi biasanya mereka tak merasa terbebani melunasi pajak jika tidak terlalu berat atau jika nilainya tetap di bawah pendapatannya tiap bulan. Ini terlepas dari fakta jika mereka menyadari pentingnya pajak. Oleh karena itu, hubungan rasa sadar untuk melunasi pajak serta pendapatan mereka harus dipelajari (Linus, 2002:3).

Dalam riset yang dilaksanakan oleh Murtiningtyas, et al. (2024) , ada empat faktor penentu yang secara signifikan mempengaruhi kesadaran pajak: pendidikan wajib pajak, durasi tinggal di lokasi objek pajak Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendapatan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak mengenai penegakan tindakan hukuman PBB. Kedua faktor yang berbeda ini diidentifikasi mempengaruhi kesadaran pajak. Penentu pertama mencakup kewajiban moral, niat, dan kontrol atas perilaku yang dirasakan. Penentu kedua terdiri dari norma dan sikap subjektif.

Riset ini berbeda dengan penelitian Hapsari & Nurkholis (2020) di mana mengkaji ketaatan wajib pajak serta menemukan hasil berupa adanya keterlibatan rasa sadar wajib pajak, tarif pajak dan Sakai pajak pada ketaatan wajib pajak saat melunasi pajak PBB.

Penyelidikan ini menyimpang dari penelitian yang dilakukan oleh Linus Karim (2002) mengenai korelasi antara pendapatan kepala keluarga dan kesadaran pembayaran pajak tanah dan bangunan (UN), karena penelitian sebelumnya menggunakan variabel tunggal, khususnya tingkat pendapatan kepala keluarga, sedangkan penelitian saat ini menggabungkan lima faktor penentu yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB, yang meliputi sikap, motivasi, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak.

Studi ini juga kontras dengan temuan Salman dan Farid (2008) mengenai dampak sikap dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor perbankan di Surabaya. Penelitian saat ini menggunakan lima variabel yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran PBB, yang terdiri dari sikap, motivasi, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak.

Meskipun kontribusi PBB tidak signifikan dalam struktur penerimaan Negara, pajak ini sangat penting serta tidak bisa dihilangkan. Tetapi, karena pembayarannya dilaksanakan oleh RT/RW di lingkungan tiap wajib pajak tinggal, itu ialah pajak yang mudah diadministrasikan. Ini karena objek pajaknya cukup banyak dan pemungutannya tidak efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak menyelenggarakan riset yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Lingkup Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?
2. Apakah sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?

3. Apakah motivasi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?
4. Apakah sanksi terhadap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan

Riset ini bermaksud guna memenuhi beberapa aspek, diantaranya ialah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap, motivasi, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk membuktikan signifikansi pengaruh sikap, motivasi, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak saat pembayaran PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi Peneliti

memakai pengetahuan yang dipelajari peneliti di kelas untuk diterapkan pada situasi saat ini.

b) Bagi Instansi Terkait

Selaku sumber informasi tambahan, dan sebagai pertimbangan teruntuk pihak berwenang dimana terlibat dalam riset ini saat menetapkan kebijakan terkait diadakannya atau pemakaian mekanisme pemungutan di mana dipakai di instansi.

c) Bagi Fakultas

Selaku sumber informasi tambahan dan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian dalam lingkup pembahasan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 Memaparkan latar belakang masalah, target pengkajian, serta ruang lingkup pengkajian. Bab ini menetapkan dasar untuk studi dengan menjelaskan konteks, pentingnya topik, dan masalah yang akan diteliti. Biasanya juga mencakup perumusan masalah dan

hipotesis.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab 2 Membahas teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian berdasarkan temuan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 Metode Penelitian menjelaskan desain pengkajian, prosedur, dan teknik yang dipakai guna mengumpulkan dan menganalisis data. Bab ini mencakup metode sampling, instrumen penelitian, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan validitas serta reliabilitas hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian secara rinci dan menganalisis data yang diperoleh. Bab ini membahas hasil penelitian, menghubungkannya dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian, dan membandingkannya dengan studi sebelumnya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran untuk pengkajian selanjutnya